



**DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH
OTONOM DI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2010**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Mega Sistiana

NIM 090910201102

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2014



**DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH OTONOM
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2006-2010**

*The Degree Of Fiscal Desentralization Of Autonomous Regions In
Jawa Timur Province 2006-2010*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Mega Sistiana
NIM 090910201102**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati karya ilmiah saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibu tercinta yang menjadi doa dalam setiap langkahku;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(terjemahan Surat Ar - Ra’du ayat 11. ¹*)

“Jer Basuki Mawa Beya”
(Moto Jawa Timur ²**)

*)Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

**)www.jatimprov.com (Diakses pada tanggal 13 Desember 2013)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mega Sistiana

nim : 090910201102

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Otonom Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010" adalah benar-benar hasil karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2014

Yang menyatakan,



Mega Sistiana

NIM 090910201102

SKRIPSI

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH OTONOM DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2010

Oleh

Mega Sistiana
NIM 090910201102

Pembimbing

Pembimbing I :_Drs. Supranoto, M.Si

Pembimbing II: M. Hadi Makmur, S.Sos,M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Otonom Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010” disahkan pada:

Hari,tanggal : 15 Januari 2014

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Anastasia M, M.Si
NIP 195805101987022001

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001

Anggota Tim Penguji,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Mengesahkan
Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010; Mega Sistiana, 090910201102; 2013: 138 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006-2010 serta komponen yang paling dominan pada PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sistem desentralisasi fiskal yang lahir akibat dari otonomi daerah merupakan strategi pemerintah pusat untuk membantu mempercepat daerah menjadi daerah otonom yang memiliki sumber keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya. Sayangnya, setelah lebih dari satu dasawarsa terselenggaranya desentralisasi fiskal, hampir seluruh daerah di Indonesia justru memiliki nilai ketergantungan fiskal yang tinggi, terlebih untuk Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memperoleh dana perimbangan yang berupa DAU paling tinggi se Indonesia selama lima tahun terakhir. Pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup baik setiap tahunnya, namun kenaikan PAD ternyata juga tersaingi oleh kenaikan jumlah dana perimbangan yang nilainya lebih besar dari PAD dan mengalami kenaikan yang besar setiap tahunnya. Kenyataan tersebut sangat berseberangan dengan fakta lain yang mengungkap jika Secara perekonomian Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi pusat ekonomi di wilayah Indonesia Timur dengan potensi sumber daya alam dan industri.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder tahun 2006-2010. Lokasi penelitian dipilih kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur. Tidak ada sample dalam penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti mengambil seluruh populasi untuk diteliti yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan tiga rasio yaitu a) rasio PAD dengan TPD; b) rasio BHPBP dengan TPD; dan c) rasio SD dengan TPD.

Hasil dari penelitian ini adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2006-2010 yang dihitung berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD termasuk kategori sangat rendah dengan rata-rata prosentase DDF sebesar 8%, sedangkan derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2006-2010 yang diukur dari rasio BHPBP dengan TPD juga memiliki prosentase yang sangat rendah yaitu rata-rata hanya 9%. Dari sisi derajat desentralisasi fiskal dengan rasio sumbangan daerah dan TPD, justru kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi yaitu mencapai 83% pada tahun 2006-2010.

Dari komponen PAD, kabupaten/kota di Jawa Timur didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Di kawasan kabupaten rata-rata komponen PAD didominasi oleh retribusi daerah, sedangkan di daerah perkotaan PAD didominasi oleh pajak dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah terus merangkak naik mulai tahun 2009 menyaingi sektor pajak daerah. Hanya kekayaan yang di pisahkan yang memiliki tingkat prosentase terendah dalam komponen PAD di kabupaten/kota di Jawa Timur.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terkira kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harry Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian selama penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember terima kasih atas bantuannya;
6. Bapak Sudjono dan Ibu Mamik yang sangat saya cintai terima kasih atas doa, dukungan dan setiap tetes keringat yang keluar dalam kerja kerasnya agar anaknya bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat;
7. Kedua adikku tercinta Andri Kurnia Sandi dan Arum Ambar Sari

8. Calon imamku Sembodo yang telah menjadi penyemangat dan pengkritik terbaik yang aku miliki;
9. Sepupu tercinta Ulfa Kurnia Sari S.Sos, terima kasih telah menjadi sosok kakak yang baik dalam segala pembelajaran pengalaman hidup;
10. Teman seperjuanganku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dian “Tante”, Titin “Nda”, Sally dan teman-temanku seperjuangan AN’09 terima kasih telah mengisi banyak cerita selama empat tahun ini, *wish all of you luck*;
11. Anak kost biru Cintya, Mira, Andin, Riri, Pipit kalian adalah teman tergilgila yang pernah aku kenal;
12. Rekan kerjaku seluruh karyawan SPBU COCO 51.68123 terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini, semoga kalian sukses selalu;
13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 15 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	21
2.2 Keuangan Daerah	37
2.2.1 Sumber Penerimaan Daerah	38
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah	39
2.2.3 Perimbangan Keuangan Pusat Dengan Daerah.....	43
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	51
2.4 Desentralisasi Fiskal	57
2.5 Derajat Desentralisasi Fiskal	60
2.6 Ketergantungan Fiskal	63

2.7 Penelitian Terdahulu	64
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	68
3.1 Jenis Penelitian	69
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	70
3.3 Penentuan Populasi	71
3.4 Definisi Operasional Variabel	71
3.5 Data dan Sumber Data	72
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	73
3.6 Teknik Penyajian dan Analisa Data	74
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
4.1.1 Geografi	76
4.1.2 Visi dan Misi	76
4.1.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	79
4.1.4 Keuangan Provinsi Jatim..	84
4.1.5 Demografi	86
4.2 Analisis Rasio DDF Kabupaten/Kota Jawa Timur 2006-2010	88
4.2.1 Rasio DDF PAD terhadap TPD	89
4.2.2 Rasio DDF BHPDBP terhadap TPD	92
4.2.3 Rasio DDF SB terhadap TPD.....	96
4.3 Analisis Kontributor PAD KAB/KOTA Jawa Timur 2006-2010	101
4.3.1 Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2006	101
4.3.2 Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2007	104
4.3.4 Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2008	106
4.3.5 Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2009	109
4.3.6 Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2010	112
4.4 Pembahasan Hasil Analisis	115
4.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal.	115
4.4.2 Analisis Komposisi PAD di Kabupaten/Kota Jawa Timur	

Tahun 2006-2010	131
BAB 5. PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan.....	135
5.2 Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2007-2010	13
Tabel 2.1	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	62
Tabel 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2006-2010.....	79
Tabel 4.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2006-2010.....	80
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010.....	86
Tabel 4.4	Rata-Rata Tingkat DDF Rasio PAD Terhadap TPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010	117
Tabel 4.5	Rata-Rata Tingkat DDF Rasio BHPBP Terhadap TPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010	124
Tabel 4.6	Perusahaan Tambang Migas dan Pengilangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun	126
Tabel 4.7	Rata-Rata Tingkat DDF Rasio Sumbangan Daerah Terhadap TPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jatim 2007-2011	14
Gambar 1.2	Distribusi Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2011	16
Gambar 1.3	Trend Komposisi Penerimaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.....	17
Gambar 2.1	Skema Dana Bagi Hasil Pajak.....	46
Gambar 2.2	Proporsi Pembagian DAU antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota	47
Gambar 2.3	Formula Dana Alokasi Umum.....	48
Gambar 2.4	Alur Perumusan Dana Alokasi Khusus	50
Gambar 4.1	Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur.....	82
Gambar 4.2	Trend Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Jawa Timur.....	83
Gambar 4.3	Jumlah Penduduk di Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur.....	87
Gambar 4.4	Jumlah Penduduk di Seluruh Kota Di Provinsi Jawa Timur.....	88
Gambar 4.5	Rasio DDF antara PAD terhadap TPD Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur	89
Gambar 4.6	Rasio DDF antara PAD terhadap TPD Seluruh Kota Di Provinsi Jawa Timur	91

Gambar 4.7	Rasio DDF antara BPHPB terhadap TPD Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur	93
Gambar 4.8	Rasio DDF antara BPHPB terhadap TPD Seluruh Kota Di Provinsi Jawa Timur	95
Gambar 4.9	Rasio DDF antara SD terhadap TPD Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur	96
Gambar 4.10	Rasio DDF antara SD terhadap TPD Seluruh Kota Di Provinsi Jawa Timur	99
Gambar 4.11	Komponen PAD Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2006	102
Gambar 4.12	Komponen PAD Seluruh Kota Di Jawa Timur Tahun 2006	103
Gambar 4.13	Komponen PAD Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2007	104
Gambar 4.14	Komponen PAD Seluruh Kota Di Jawa Timur Tahun 2007	106
Gambar 4.15	Komponen PAD Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2008	107
Gambar 4.16	Komponen PAD Seluruh Kota Di Jawa Timur Tahun 2008	108
Gambar 4.17	Komponen PAD Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2009	109
Gambar 4.18	Komponen PAD Seluruh Kota Di Jawa Timur Tahun 2009	111
Gambar 4.19	Komponen PAD Seluruh Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2010	112
Gambar 4.20	Komponen PAD Seluruh Kota Di Jawa Timur Tahun 2010	114

Gambar 4.21	Rata-Rata Perbandingan PAD dan TPD Kab/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006-2010.....	115
Gambar 4.22	Rata-Rata Tingkat DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006-2010.....	116
Gambar 4.23	Peta rata-rata DDF Rasio PAD dengan TPD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2006-2010.....	118
Gambar 4.24	Rata-Rata Pertumbuhan PAD dan TPD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010.....	120
Gambar 4.25	Rata-Rata Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010.....	121
Gambar 4.26	Rata-Rata Pertumbuhan PAD dan Pengeluaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010.....	123
Gambar 4.27	Peta rata-rata DDF Rasio BHPBP dengan TPD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2006-2010.....	125
Gambar 4.28	Rata-Rata Pertumbuhan DDF Rasio PAD dan DDF Rasio BHPBP Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	127
Gambar 4.29	Peta rata-rata DDF Rasio SD dengan TPD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2006-2010.....	129
Gambar 4.30	Rata-Rata Perkembangan Belanja Pegawai dengan DAU Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	130
Gambar 4.31	Rata-Rata Perkembangan Komponen PAD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	132
Gambar 4.28	Rata-Rata Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	PAD,DBH,Sumbangan Dearah serta DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006.....	144
Lampiran 2.	PAD,DBH,Sumbangan Dearah serta DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007.....	145
Lampiran 3.	PAD,DBH,Sumbangan Dearah serta DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008.....	146
Lampiran 4.	PAD,DBH,Sumbangan Dearah serta DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009.....	147
Lampiran 5.	PAD,DBH,Sumbangan Dearah serta DDF Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010.....	148
Lampiran 6.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006.....	149
Lampiran 7.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007.....	150
Lampiran 8.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008.....	151
Lampiran 9.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009.....	152
Lampiran 10.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010.....	153
Lampiran 11.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB & ADHK Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006-2010	154
Lampiran 12.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008-2009	155

Lampiran 13. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011	156
Lampiran 14. Rata-rata PDRB,DDF dan Komponen PAD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006-2010	157
Lampiran 15. Rata-rata Pertumbuhan DDF dan PAD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	158
Lampiran 16. Trend Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2006-2010	159
Lampiran 17. Trend Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007-2010	160
Lampiran 18. Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember	161
Lampiran 19. Surat ijin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	162